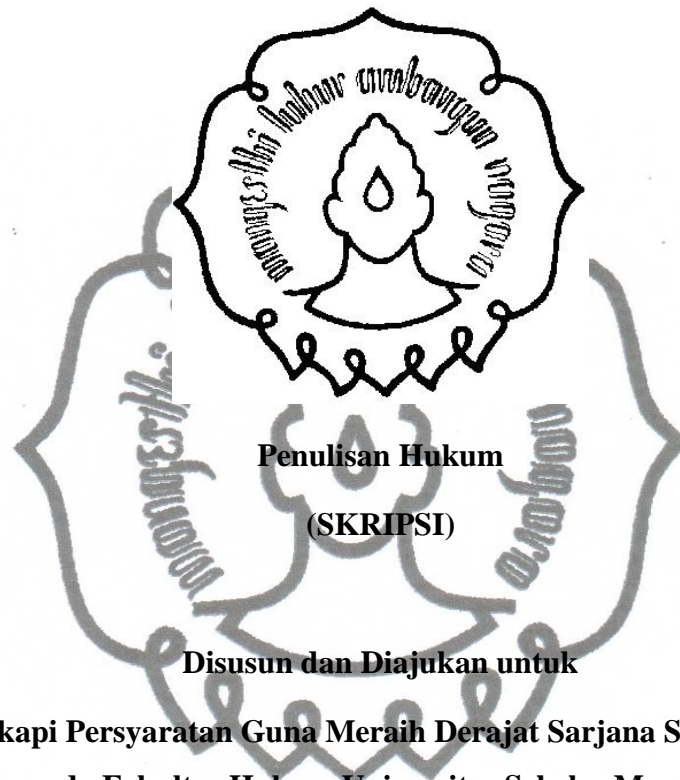


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM
MORATORIUM PEMBUKAAN LAHAN BARU DI SEKTOR
KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
*GREEN CONSTITUTION***



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

HIDAYATUL KHAKIMAH

NIM. E 0012187

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM
MORATORIUM PEMBUKAAN LAHAN BARU DI SEKTOR
KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
*GREEN CONSTITUTION***

Oleh :

HIDAYATUL KHAKIMAH

E. 0012187

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

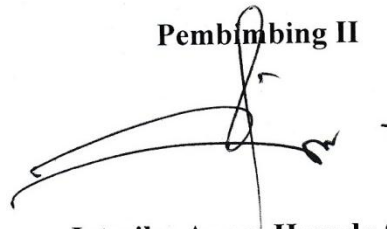
Surakarta, 13 Juli 2016

Pembimbing I



**Maria Madalina, SH.,M.Hum
NIP. 196010241986022001**

Pembimbing II



**Jatmiko Anom Husodo, SH., M.H
NIP. 197004241995121001**

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM MORATORIUM
PEMBUKAAN LAHAN BARU DI SEKTOR KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN *GREEN CONSTITUTION***

Disusun Oleh :

HIDAYATUL KHAKIMAH

E. 0012187

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari : Senin
Tanggal : 1 Agustus 2016

1. Suranto, S.H., M.H
NIP. 195608121986011001
Ketua
2. Maria Madalina, S.H., M.Hum
NIP. 196010241986022001
Sekretaris
3. Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H
NIP. 197004241995121001
Anggota

()
()
()

Mengetahui :
Dekan

(Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum)
NIP. 19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : HIDAYATUL KHAKIMAH

NIM : E0012187

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM
MORATORIUM PEMBUKAAN LAHAN BARU DI SEKTOR
KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN**

GREEN CONSTITUTION adalah betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Juli 2016



Hidayatul Khakimah

NIM. E0012187

MOTTO

“Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketaqwaannya”

(QS Muhammad : 17)

“Ilmu adalah pemimpin, dan amal perbuatan adalah makmumnya”

(Mu'addz bin Jabal r.a)

“Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati fungsi”

(Kahlil Gibran)

“Kebahagiaan anda tumbuh berkembang manakala anda membantu orang lain. Namun, bilamana anda tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman, harus di sirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi”

(J. Donald Walters)

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan selalu memberikan kebahagiaan dalam hidup saya.
2. Kakak-kakakku, kalian adalah inspirasi dan semangat saya.
3. Keluarga besarku, yang senantiasa memberikan dukungannya.
4. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum UNS, yang telah menjadi keluarga kedua saya.
5. Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) "Principium", yang telah memberikan ilmu penulisan kepada saya.
6. Teman-teman komunitas Klaten yang selalu memberikan semangat kepada saya.
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

commit to user

ABSTRAK

HIDAYATUL KHAKIMAH, E0012187. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM MORATORIUM PEMBUKAAN LAHAN BARU DI SEKTOR KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *GREEN CONSTITUTION*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian Hukum ini merupakan hasil analisa tentang implikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya hutan yang semakin parah. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi, bahkan kerusakan terhadap lingkungan telah menjadi isu internasional. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki sektor kehutanan yang luas, maka negara Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga kelestarian hutan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek. Hutan selain merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam pemanfaatannya dari berbagai bagian yang ada hingga terjadi eksploitasi di sektor kehutanan. Penggunaan di sektor kehutanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan Hutan belum mampu mengakomodir pengendalian kerusakan lingkungan di sektor kehutanan. Ketidakkampuan tersebut disebabkan karena belum terdapatnya prinsip-prinsip *green constitution* yang terdiri dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya tegas dalam mewujudkan *green constitution* dalam pemulihan hutan adalah melalui moratorium hutan, yang kemudian diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden sebelumnya. Selain itu, juga terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.

Kata Kunci : Peran Negara, *Green Constitution*, Moratorium

ABSTRACT

HIDAYATUL KHAKIMAH, E0012187. JURIDICAL REVIEW OF STATE IN THE MORATORIUM OPENING ROLE LAND NEW IN SECTOR FORESTRY AS GREEN EFFORTS TO ACHIEVE THE CONSTITUTION. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

Legal research is the result of an analysis of the implications of environmental damage caused by forest destruction are getting worse. Forest is a natural resource that has a major role to the survival of living creatures on the earth, or even damage to the environment has become an international issue. Indonesia is the third country in the world that has a comprehensive forestry sector, the Indonesian state have an important role in conserving the forests that can be implemented in various aspects. Besides forest is a natural resource that has a high economic value in their usage of various parts that are to occur in the exploitation of the forestry sector. The use in the forestry sector in Indonesia has been regulated in Act Number 41 of 1999 on Forestry boosted by Act Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest damage have not been able to accommodate the environmental damage control in the forestry sector. That inability, due to the presence of the principles not yet green constitution which consists of environmentally sustainable development. Efforts resolute in realizing green constitution restoring forests is through a forest moratorium, which is regulated in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 8 of 2015 On New Permit Delays And Improving Governance Primary Forest and Peatland is a follow up to Presidential Instruction before. In addition, there is also the Indonesian Presidential Regulation Number 62 of 2013 on the Management Board Decrease Greenhouse Gas Emissions From Deforestation, forest degradation and peatland.

Keywords: Role of the State, Green Constitution, Moratorium

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka hambatan-hambatan tersebut dapat terselesaikan. Untuk segala bantuan, arahan, dan bimbingan, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Maria Madalina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan dalam menyusun serta menyelesaikan proses pembuatan skripsi;
4. Suranto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
5. Dr. Isharyanto S.H., M.Hum selaku dosen yang sangat menginspirasi bagi penulis;
6. Lushiana Primasari, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ilmu pengetahuan selama menempuh perkuliahan, sebagai bekal pengetahuan yang akan digunakan di kehidupan yang akan datang;
8. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas bimbingan, doa, dukungan dan semangatnya selama ini;
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

commit to user

Penulis berharap semoga penulisan skripsi dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bidang hukum, serta dapat berguna dan bermanfaat bagi keilmuan hukum.

Surakarta, 13 Juli 2016

Penulis

Hidayatul Khakimah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Mengenai Peran Negara.....	14
2. Tinjauan Mengenai <i>Green Constitution</i>	17

commit to user

3. Tinjauan Mengenai <i>Good Governance</i>	22
4. Tinjauan Mengenai Moratorium.....	28
5. Tinjauan Mengenai Kehutanan.....	35
6. Tinjauan Mengenai Lingkungan Hidup.....	39
7. Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia.....	43
B. Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru di Sektor Kehutanan Guna Mewujudkan <i>Green Constitution</i>	49
B. Kesesuaian Peran-Peran Yang Dilakukan Negara Dengan Prinsip-Prinsip <i>Green Constitution</i>	85
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	109
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	3
Tabel 2.....	57



commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	20
Gambar 2.....	30
Gambar 3.....	30
Gambar 4.....	31
Gambar 5.....	33
Gambar 6.....	34
Gambar 7.....	47
Gambar 8.....	72
Gambar 9.....	72
Gambar 10.....	73
Gambar 11.....	73
Gambar 12.....	80
Gambar 13.....	89
Gambar 14.....	93
Gambar 15.....	99
Gambar 16.....	104
Gambar 17.....	107

